

Perjuangan Kemerdekaan dan Transisi Politik di Negara-Negara Maghrib: Maroko, Aljazair, dan Tunisia

The Struggle for Independence and Political Transition in the Maghrib Countries: Morocco, Algeria, and Tunisia

Muhamad Syahrus Sobirin¹, Mohammad Izdiyan Muttaqin², Mulawarman Hannase³,
Nurwahidin⁴

¹²³⁴Universitas Indonesia

Email korespondensi: muhamad.syahrus@ui.ac.id

Diterima 26 Desember 2025 | Direvisi 12 Mei 2026 | Diterbitkan 1 Juni 2026

ABSTRACT

The struggle for independence and political transition in the Maghreb region reflects a complex historical dynamic shaped by interactions among European colonialism, nationalist mobilization, and post-colonial state reconstruction, each unfolding within distinct socio-political contexts in Morocco, Algeria, and Tunisia. French and Spanish colonialism created heterogeneous political structures, ranging from protectorates in Morocco and Tunisia to settler colonies in Algeria, which in turn determined the strategic approaches of each country's independence movement. Morocco emphasized diplomacy led by Sultan Mohammed V and supported by nationalist organizations; Tunisia centralized its political movement through the Neo-Destour party with a strongly negotiation-oriented approach; while Algeria pursued a prolonged armed struggle led by the FLN in response to repressive settler colonialism. These differences in the character of the struggle produced non-uniform political transitions: Morocco transformed into a constitutional monarchy with relatively high stability through the centrality of monarchical power; Algeria developed a military-dominated political system and experienced prolonged internal conflict, including a civil war; whereas Tunisia pursued institutional modernization from the early post-independence period and later entered a phase of democratic reform after the 2011 revolution, despite facing serious challenges in political institution consolidation. The contemporary political constellation of the Maghreb demonstrates that colonial legacies, post-independence elite configurations, and domestic social dynamics strongly influence state formation processes, regional stability, and long-term political trajectories. Therefore, understanding the history of the independence struggles and political transitions in these three countries is key to a comprehensive analysis of the geopolitical development of North Africa.

Keywords: colonialism, independence, Maghreb, North Africa, political transition

ABSTRAK

Perjuangan kemerdekaan dan transisi politik di kawasan Maghrib mencerminkan dinamika historis yang kompleks serta interaksi antara kolonialisme Eropa, mobilisasi nasionalis, dan rekonstruksi negara pascakolonial yang berlangsung dalam konteks sosial politik yang berbeda di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Kolonialisme Prancis dan Spanyol membentuk struktur politik yang tidak seragam, mulai dari protektorat di Maroko dan Tunisia hingga koloni pemukim di Aljazair, yang kemudian menentukan strategi perjuangan masing-masing negara. Maroko mengutamakan diplomasi yang dipimpin Sultan Mohammed V dan dukungan organisasi nasionalis, Tunisia memusatkan gerakan politik melalui *Neo-Destour* dengan orientasi negosiasi yang kuat, sementara Aljazair menempuh perang bersenjata panjang melalui FLN sebagai respons terhadap kolonialisme pemukim yang represif. Perbedaan karakter perjuangan tersebut menghasilkan bentuk transisi politik yang tidak seragam: Maroko bertransformasi menjadi monarki konstitusional dengan stabilitas relatif tinggi melalui sentralitas kekuasaan monarki; Aljazair mengembangkan sistem politik yang didominasi militer dan menghadapi konflik internal berkepanjangan hingga perang saudara; sedangkan Tunisia mengalami modernisasi institusional sejak awal kemerdekaan, kemudian memasuki fase reformasi demokratis setelah revolusi 2011 meskipun menghadapi tantangan serius dalam konsolidasi lembaga politik. Konstelasi politik kontemporer Maghrib memperlihatkan bahwa warisan kolonial, konfigurasi elit pascakemerdekaan, dan dinamika sosial domestik memiliki pengaruh kuat terhadap proses pembentukan negara, stabilitas kawasan, serta arah politik jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah perjuangan dan transisi politik ketiga negara ini menjadi kunci untuk membaca perkembangan geopolitik Afrika Utara secara lebih komprehensif.

Kata kunci: Afrika Utara, kemerdekaan, kolonialisme, Maghrib, transisi politik

PENDAHULUAN

Kawasan Maghrib yang terdiri atas Maroko, Aljazair, dan Tunisia merupakan salah satu kawasan strategis di Afrika Utara yang selama berabad-abad berada dalam pengaruh kekuatan eksternal, terutama Eropa. Kawasan ini memiliki posisi geopolitik yang penting karena terhubung langsung dengan Laut Tengah, Samudra Atlantik, dan Gurun Sahara, sehingga menjadi ruang interaksi perdagangan, migrasi, dan ekspansi politik. Pada abad kesembilan belas, dominasi kolonial yang dilakukan oleh Prancis dan Spanyol membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik yang kemudian diwariskan kepada negara-negara modern di kawasan tersebut. Kolonialisme yang berlangsung dalam jangka panjang menyebabkan perubahan dalam struktur administratif, pembagian tanah, serta relasi antara elit lokal dan kekuatan kolonial. Para ahli seperti Laroui menjelaskan bahwa kolonialisme di Afrika Utara memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan wilayah Afrika lainnya karena intensitas penetrasi politik dan administratif yang sangat kuat, terutama di Aljazair yang dijadikan bagian integral dari Prancis (Laroui, 1977). Kondisi inilah yang membuat dinamika kolonialisme Maghrib menjadi objek kajian penting dalam studi politik Timur Tengah dan Afrika Utara.

Kawasan ini mengalami pengalaman kolonial yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Maroko berada dalam sistem protektorat sejak 1912 yang membagi kekuasaan antara Prancis dan Spanyol. Tunisia berada di bawah kekuasaan protektorat Prancis sejak 1881 melalui Konvensi Bardo yang menempatkan monarki Husainiyah sebagai institusi simbolis dengan kendali administratif di tangan Prancis. Aljazair mengalami kolonialisme paling intensif karena sejak 1830 dijadikan koloni pemukiman oleh Prancis yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam administrasi nasional Prancis. Perbedaan karakter kolonialisme ini secara langsung memengaruhi cara masyarakat di tiga negara merespons dominasi asing serta strategi perjuangan kemerdekaan yang kemudian muncul. Evans menjelaskan bahwa Aljazair merupakan contoh kolonialisme pemukim yang agresif yang melibatkan dominasi demografis dan politik oleh komunitas pemukim Eropa yang dikenal sebagai *pieds-noirs*, sehingga menciptakan ketegangan struktural berkepanjangan antara penduduk lokal dan pemukim (Evans, 2012). Sementara itu, kolonialisme protektorat di Maroko dan Tunisia memiliki karakter politis yang lebih moderat karena kekuasaan kolonial tetap mempertahankan institusi lokal sebagai alat legitimasi.

Studi mengenai kawasan Maghrib penting karena kawasan ini sangat relevan dengan perkembangan politik kontemporer di Afrika Utara. Negara-negara Maghrib mengalami proses dekolonisasi pada pertengahan abad kedua puluh dengan dinamika perjuangan yang sangat berbeda satu sama lain. Tunisia merdeka pada 1956 setelah melalui fase panjang negosiasi politik antara *Neo Destour* dan pemerintah Prancis. Maroko juga mencapai kemerdekaan pada tahun yang sama setelah kombinasi tekanan rakyat, diplomasi internasional, dan peran Sultan Mohammed V. Aljazair baru memperoleh kemerdekaan pada 1962 setelah perang panjang antara Front Pembebasan Nasional dan militer Prancis. Perbedaan pengalaman perjuangan kemerdekaan ini menghasilkan variasi dalam pola konsolidasi negara dan institusi politik pascakolonial. Karena itu, banyak penelitian menyoroti Maghrib sebagai kawasan yang mencerminkan transisi politik yang kompleks dalam konteks pascakolonial. Horne menegaskan bahwa pengalaman Aljazair merupakan salah satu contoh paling dramatis tentang bagaimana perang dekolonisasi membentuk karakter politik negara pada era pascakemerdekaan (Horne, 2006).

Kajian mengenai hubungan antara kolonialisme dan pembentukan negara di kawasan Maghrib juga menjadi perhatian banyak ilmuwan karena kolonialisme secara langsung membentuk struktur administrasi modern. Prancis dan Spanyol memperkenalkan sistem hukum, administrasi publik, dan mekanisme kontrol politik yang secara signifikan

memengaruhi institusi negara yang muncul setelah kemerdekaan. Dalam konteks Maghrib, kolonialisme tidak hanya berupa dominasi politik, tetapi juga penataan ulang struktur ekonomi, terutama penguasaan tanah dan sumber daya yang menjadi basis ekonomi masyarakat lokal. Burke menjelaskan bahwa kolonialisme di Maroko telah menciptakan kelas elit baru yang berkolaborasi dengan kekuatan kolonial dan terus memengaruhi perkembangan politik negara setelah kemerdekaan (Burke, 2019). Pemahaman akan proses transformasi sosial ini penting untuk memahami mengapa pola transisi politik di negara-negara Maghrib tidak seragam dan sangat dipengaruhi oleh beragam warisan kolonial.

Perkembangan politik Afrika Utara modern tidak bisa dipisahkan dari proses resistensi terhadap kolonialisme. Resistensi tersebut muncul dalam berbagai bentuk seperti revolusi bersenjata, gerakan nasionalis, perjuangan diplomatik, dan mobilisasi masyarakat sipil. Tunisia dan Maroko menempuh jalur negosiasi dalam perjuangan kemerdekaan, sementara Aljazair mengalami perang panjang yang melibatkan mobilisasi massa serta konflik bersenjata yang intens. Variasi strategi perjuangan kemerdekaan ini mencerminkan perbedaan struktur kolonial serta respons masyarakat lokal terhadap penindasan tersebut. Bourguiba dari Tunisia menggunakan pendekatan politik dan diplomasi untuk menekan Prancis agar memberikan otonomi. Di Maroko, Sultan Mohammed V memosisikan dirinya sebagai simbol perjuangan rakyat. Sementara itu, FLN di Aljazair mengandalkan gerakan gerilya dan mobilisasi internasional untuk memperoleh dukungan bagi perjuangan mereka. Semua variasi ini mencerminkan dinamika kolonialisme yang kompleks yang kemudian terus berpengaruh hingga masa pascakolonial.

Transisi politik pascakemerdekaan menjadi fokus penting dalam analisis kawasan Maghrib karena menunjukkan bagaimana institusi negara menghadapi tantangan untuk mempertahankan stabilitas, membangun legitimasi, dan mengelola keragaman sosial. Maroko membangun sistem monarki konstitusional yang menempatkan raja sebagai pusat kekuasaan politik. Tunisia pada masa Bourguiba menjalankan proyek modernisasi yang menekankan sekularisasi, pendidikan, dan reformasi sosial tanpa melibatkan kekuatan militer secara dominan. Aljazair justru membangun sistem politik berbasis satu partai di bawah FLN dengan peran sentral militer dalam pengambilan keputusan politik. Charrad mencatat bahwa kebijakan negara pascakemerdekaan di Tunisia sangat dipengaruhi oleh orientasi modernisasi awal yang dibangun Bourguiba, termasuk reformasi hukum keluarga yang progresif (Charrad, 2002). Sementara itu, struktur politik Aljazair pascakemerdekaan menunjukkan kecenderungan sentralisasi yang kuat serta keterlibatan militer yang bertahan hingga dekade berikutnya.

Transisi tersebut juga memengaruhi orientasi politik luar negeri masing-masing negara. Maroko mengembangkan hubungan erat dengan Barat, terutama Prancis dan Amerika Serikat, serta memperkuat posisinya di benua Afrika dengan bergabung kembali ke Uni Afrika pada 2017. Aljazair lebih berorientasi pada politik nonblok dan mempertahankan identitasnya sebagai negara yang lahir dari perjuangan revolusioner. Tunisia memainkan peran moderat dalam hubungan internasional dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional dan internasional. Perbedaan orientasi politik luar negeri ini mencerminkan perbedaan basis legitimasi politik dalam negeri yang terbentuk sejak masa awal kemerdekaan. Selain itu, dinamika keamanan kawasan yang melibatkan isu migrasi, terorisme, dan stabilitas regional turut membentuk pola hubungan internasional negara-negara Maghrib dalam beberapa dekade terakhir.

Studi mengenai kawasan Maghrib juga berkontribusi dalam memahami bagaimana negara-negara pascakolonial membangun identitas nasional. Identitas nasional di Maroko dibentuk melalui kombinasi legitimasi monarki, tradisi Islam, dan pengaruh sejarah panjang dinasti Alawiyah. Di Tunisia, identitas nasional banyak dibentuk oleh proyek modernisasi negara yang menekankan sekularisme dan kebijakan sosial. Aljazair membangun identitas nasional berdasarkan narasi perjuangan revolusi yang menentang kolonialisme Prancis, sehingga memosisikan kemerdekaan sebagai fondasi moral dan politik negara. Willis menjelaskan bahwa struktur partai politik dan dinamika identitas nasional di kawasan Maghrib sangat dipengaruhi oleh konteks historis perjuangan kemerdekaan serta hubungan antara negara dan masyarakat sipil (Willis, 2012). Oleh sebab itu, analisis historis sangat penting untuk memahami perkembangan politik kontemporer.

Konstelasi geopolitik Afrika Utara modern tidak dapat dipahami tanpa mengkaji hubungan antara sejarah kolonialisme dan pembentukan negara-bangsa di kawasan Maghrib. Kolonialisme telah melahirkan sejumlah permasalahan struktural, seperti ketimpangan ekonomi, ketegangan sosial, dan polarisasi politik, yang terus memengaruhi dinamika internal negara-negara tersebut. Selain itu, proses dekolonisasi membentuk struktur pemerintahan dan identitas politik yang berbeda di antara Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Perbedaan tersebut berkontribusi terhadap ketidakseragaman pola perkembangan politik hingga abad ke-21. Maghrib menjadi kawasan strategis yang memainkan peran penting dalam hubungan Eropa Afrika terutama terkait isu migrasi lintas Mediterania dan kerja sama ekonomi. Pemahaman mengenai dinamika historis ini sangat penting untuk menilai bagaimana negara-negara di kawasan tersebut menghadapi tantangan kontemporer.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif sejarah kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, serta transisi politik pascakemerdekaan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia dengan pendekatan historis dan politologis. Melalui analisis ini, penelitian ini menekankan hubungan erat antara struktur kolonial masa lalu dan orientasi politik negara-negara Maghrib pada masa kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang membentuk variasi transisi politik di kawasan Maghrib serta dampaknya terhadap stabilitas regional. Dengan memberikan perhatian pada konteks historis, sosial, dan politik, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap kajian Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama dalam memahami bagaimana warisan kolonial masih memengaruhi konfigurasi politik di kawasan tersebut hingga saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kualitatif dan politologis untuk menganalisis perjuangan kemerdekaan serta transisi politik di Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan kolonialisme, gerakan nasionalis, serta dinamika sosial-politik pascakolonial, sementara pendekatan politologis digunakan untuk memahami bentuk transisi politik, struktur pemerintahan, dan orientasi politik luar negeri negara-negara Maghrib. Subjek penelitian adalah peristiwa sejarah, kebijakan kolonial, gerakan nasionalis, dan transisi politik pascakemerdekaan, sedangkan bahan penelitian berupa dokumen sejarah, laporan akademik, dan literatur sekunder yang terkait dengan politik di Afrika Utara. Analisis difokuskan pada konteks sosial politik, strategi perjuangan kemerdekaan, dan model transisi politik masing-masing negara (Laroui, 1977).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur dan dokumen historis, termasuk buku sejarah, jurnal akademik, dokumen kolonial, arsip diplomatik, serta laporan penelitian sebelumnya tentang Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengidentifikasi sumber primer dan sekunder yang relevan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid terkait proses kolonialisme, strategi perjuangan kemerdekaan, serta pola transisi politik di ketiga negara tersebut. (Evans, 2012)

Rancangan penelitian menggunakan desain studi komparatif historis, yang membandingkan dinamika kolonialisme dan transisi politik antara Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Analisis dilakukan secara tematik dan kronologis, dimulai dari masa kolonial, proses

perjuangan kemerdekaan, hingga perkembangan pascakemerdekaan. Variabel yang dianalisis mencakup jenis kolonialisme, strategi perjuangan kemerdekaan, struktur politik pascakemerdekaan, serta stabilitas politik kontemporer. Teknik pengambilan sampel bersifat purposive sampling, dengan memilih literatur dan dokumen yang paling representatif serta paling sering dikutip dalam kajian sejarah dan politik Maghrib. (Pennell, 2000)

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kolonialisme, mobilisasi nasionalis, dan transisi politik. Analisis juga menekankan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi variasi transisi politik, termasuk warisan kolonial, konfigurasi elit pascakemerdekaan, serta dinamika sosial domestik. Model statistik tidak digunakan karena penelitian bersifat kualitatif dan historis, namun, temuan dianalisis secara sistematis melalui perbandingan antarnegara dan pengelompokan tematik. (Charrad, 2002)

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada kajian politik dan sejarah Maghrib dengan menekankan pemahaman tentang bagaimana pengalaman kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan transisi politik membentuk identitas nasional serta orientasi politik kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif bagi studi Afrika Utara dan kajian Timur Tengah, khususnya mengenai interaksi antara kolonialisme, nasionalisme, dan pembangunan negara pascakolonial (Burke, 2019).

PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa kolonialisme di kawasan Maghrib memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap negara. Di Mroko, kolonialisme Prancis melalui protektorat 1912-1956 menekankan kontrol administratif dan ekonomi secara langsung, merombak struktur politik sultan, memperkenalkan birokrasi modern, serta membatasi kewenangan tradisional. Kebijakan ekonomi menguntungkan perusahaan Eropa dan menciptakan ketimpangan kepemilikan tanah, yang memicu munculnya embrio nasionalisme modern. Infrastruktur kolonial dibangun sepenuhnya untuk kepentingan Prancis, dan pendidikan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja prokolonial. (Pennell, 2000)

Di Aljazair, kolonialisme bersifat pemukiman dan berlangsung lama sejak 1830. Pemerintah kolonial Prancis menempatkan pemukim Eropa (*pieds noirs*) dengan hak politik dan ekonomi yang lebih besar daripada penduduk Muslim, memperkenalkan *Code de l'Indigénat*, serta mengambil alih tanah secara besar-besaran untuk kepentingan agrikultur Eropa. Pendidikan dan budaya disusun untuk menekan penduduk asli, sehingga muncul

ketegangan struktural dan memicu resistensi bersenjata melalui *Front de Libération Nationale*. (Evans, 2012)

Tunisia berada di bawah protektorat Prancis sejak 1881, dengan sistem yang lebih moderat, yang secara simbolis mempertahankan monarki Husainiyah. Perjuangan kemerdekaan berfokus pada mobilisasi politik melalui *Neo-Destour* dan negosiasi dengan Prancis, sehingga Tunisia memperoleh kemerdekaan secara relatif damai pada 1956. (Anderson, 1986)

Proses kemerdekaan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia menunjukkan variasi strategi perjuangan. Maroko memadukan mobilisasi massa, diplomasi internasional, dan peran sultan untuk meraih kemerdekaan pada 1956. Aljazair melakukan perjuangan bersenjata panjang selama delapan tahun dengan dukungan diplomasi global, sehingga kemerdekaan tercapai pada 1962. Tunisia menempuh jalur diplomasi politik melalui partai nasionalis, mengutamakan negosiasi damai yang berhasil pada 1956. Strategi yang berbeda ini mencerminkan konteks kolonial, karakter masyarakat, serta kapasitas institusi politik di masing-masing negara. (Horne, 2006)

Transisi politik pascakemerdekaan menunjukkan perbedaan dalam model pembangunan negara. Maroko menekankan konsolidasi monarki konstitusional dan reformasi bertahap, Aljazair mengadopsi sistem satu partai dengan dominasi militer, sedangkan Tunisia menekankan modernisasi sosial sebelum memasuki demokratisasi pasca-2011. Reformasi ekonomi, pendidikan, dan hak-hak sipil menjadi indikator keberhasilan transisi, dengan tingkat stabilitas dan partisipasi politik yang berbeda-beda. (Pennell, 2000)

Dinamika ekonomi dan sosial pascakolonial turut memengaruhi transisi politik. Maroko melakukan diversifikasi ekonomi dan modernisasi pendidikan, Aljazair bergantung pada minyak dan gas dengan kontrol militer, sedangkan Tunisia fokus pada pembangunan pendidikan, manufaktur, dan integrasi gender. Faktor ini membentuk kapasitas negara dalam menghadapi konflik sosial, krisis ekonomi, serta pembangunan institusi-institusi demokratis. (Anderson, 1986)

Keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kolonial, karakter elit politik, strategi perjuangan kemerdekaan, dan model transisi pascakolonial membentuk arah pembangunan politik, ekonomi, dan sosial di Maghrib. Setiap negara menampilkan kombinasi unik antara stabilitas, modernisasi, dan demokratisasi, sehingga studi komparatif ini memberikan wawasan bagi analisis dekolonisasi dan pembangunan negara-bangsa di Afrika Utara. (Evans, 2012)

Sejarah kolonialisme di kawasan Maghribi

Maroko

Kolonialisme di Maroko dimulai secara formal pada tahun 1912 ketika Perjanjian Fez menjadikan negara tersebut sebagai protektorat yang dibagi antara Prancis dan Spanyol. Prancis menguasai wilayah tengah dan selatan, sementara Spanyol menguasai Maroko utara dan sebagian wilayah Sahara. Meskipun disebut sebagai protektorat, struktur administrasi yang diterapkan Prancis menunjukkan pola kontrol langsung yang sangat menyerupai bentuk kolonialisme penuh. Prancis merombak institusi politik tradisional, mengurangi kewenangan sultan, serta memperkenalkan birokrasi modern untuk memastikan dominasi absolutnya. Selain itu, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan perusahaan Eropa, terutama di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan luar negeri. Situasi ini memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan elit terdidik dan kelompok urban, yang pada akhirnya melahirkan embrio nasionalisme modern. Pembatasan yang diberlakukan terhadap otoritas Sultan semakin memperdalam ketegangan politik dan memperkuat tuntutan kemerdekaan. Pola kolonial ini mengubah struktur sosial Maroko secara besar-besaran. Referensi dapat ditemukan dalam karya Pennell mengenai sejarah modern Maroko, yang menguraikan secara komprehensif kolonialisme secara rinci. (Pennell, 2000).

Sistem protektorat Prancis di Maroko bersifat sangat terpusat. Administrasi kolonial membuat keputusan penting terkait peraturan pertanian, perpajakan, hukum, dan pembangunan infrastruktur. Prancis memanfaatkan Maroko sebagai basis untuk memperkuat kepentingan strategisnya di Afrika Utara, terutama untuk mempertahankan pengaruh militernya dan memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam. Institusi adat, termasuk Dewan Ulama dan Majelis lokal, hanya diberi peran simbolis untuk mempertahankan legitimasi budaya, tetapi tidak memiliki kewenangan yang substansial. Kebijakan pendidikan kolonial juga diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terampil yang pro-kolonial, bukan untuk mendorong emansipasi masyarakat Maroko. Pada masa ini, Prancis membangun proyek infrastruktur besar seperti rel kereta api dan pelabuhan yang seluruhnya berorientasi pada kepentingan kolonial. Reformasi administratif dan ekonomi ini memperkuat dominasi Prancis serta melemahkan struktur tradisional kerajaan. Temuan ini dijelaskan secara mendalam dalam karya Burke tentang transformasi negara Maroko pada abad ke-20. (Burke, 2019).

Pengaruh kolonialisme Prancis terhadap struktur sosial Maroko semakin terlihat melalui perubahan kepemilikan tanah dan sistem agraria yang membuat penduduk lokal kehilangan

banyak wilayah produktif. Prancis memberikan hak istimewa kepada pemukim Eropa untuk mengelola perkebunan komersial yang menghasilkan produk ekspor seperti jeruk, anggur, dan zaitun. Ketimpangan distribusi tanah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pedesaan dan memperlebar jurang antara kelompok lokal dan pemukim asing. Selain itu, otoritas Prancis memperkenalkan hukum tanah yang mengatur ulang kepemilikan tradisional yang sebelumnya berbasis pada sistem komunal. Kebijakan ini menciptakan pola marginalisasi ekonomi yang berlangsung hingga awal kemerdekaan. Analisis tentang struktur agraria dan marginalisasi penduduk Maroko akibat kolonialisme telah dibahas dalam berbagai kajian sejarah Afrika Utara, termasuk karya Laroui yang menempatkan kolonialisme sebagai faktor utama perubahan sosial. (Laroui, 1977).

Aljazair

Kolonialisme Prancis di Aljazair memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan Maroko dan Tunisia karena bersifat pemukiman dan berlangsung paling lama. Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 setelah melakukan operasi militer terhadap Kesultanan Utsmani setempat. Sejak saat itu, Prancis menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari teritori nasionalnya yang dibagi menjadi tiga departemen administratif. Kebijakan pemukiman mendorong migrasi besar-besaran warga Eropa yang kemudian disebut sebagai *pieds-noirs*. Mereka memperoleh hak politik dan ekonomi lebih besar daripada penduduk asli. Prancis memperkenalkan *Code de l'Indigénat* yang membatasi hak sipil penduduk Muslim Aljazair, termasuk kebebasan bergerak, hak atas tanah, dan akses terhadap pendidikan. Sistem hukum diskriminatif ini memperkuat stratifikasi sosial dan menciptakan ketegangan berkepanjangan antara penduduk lokal dan para pemukim Eropa. Detail mengenai sifat kolonialisme pemukiman di Aljazair dibahas secara komprehensif oleh Evans dalam kajiannya tentang Perang Aljazair (Evans, 2012).

Salah satu aspek paling penting dari kolonialisme Prancis di Aljazair adalah kebijakan pengambilalihan tanah secara besar-besaran yang menguntungkan para pemukim Eropa. Pemerintah kolonial merampas tanah subur yang selama berabad-abad dimiliki oleh komunitas lokal dan mengalihkan tanah tersebut kepada perusahaan agrikultur Eropa serta individu pemukim. Perubahan sistem agraria ini menyebabkan kehancuran ekonomi masyarakat Muslim yang menjadi buruh murah atau kehilangan mata pencaharian sama sekali. Prancis juga membentuk sistem pendidikan yang secara sengaja meminggirkan penduduk Muslim dengan membatasi akses mereka ke sekolah menengah dan universitas. Kebijakan ini menciptakan

kesenjangan pendidikan yang sangat besar dan berdampak hingga masa kemerdekaan. Horne menjelaskan bahwa model kolonial ini menjadi salah satu penyebab utama munculnya perlawanan bersenjata pada pertengahan abad ke-20 (Horne, 2006).

Ketegangan antara pemukim Eropa dan penduduk Muslim semakin meningkat ketika Prancis berupaya melakukan asimilasi budaya secara paksa. Pemerintah kolonial menargetkan transformasi masyarakat Aljazair melalui penyeragaman budaya dengan nilai-nilai Prancis. Bahasa Arab dipinggirkan dalam sistem pendidikan dan administrasi publik, sementara praktik agama Islam diawasi ketat oleh otoritas kolonial. Struktur politik kolonial memungkinkan pemukim Eropa mendominasi dewan lokal dan pemerintahan pusat departemen Aljazair. Ketidaksetaraan struktural ini memperdalam perlawanan masyarakat Aljazair yang kemudian terorganisasi dalam kelompok nasionalis modern pada awal abad kedua puluh. Kondisi kolonial ini telah diteliti secara mendalam oleh Brett dan Fentress, yang menjelaskan bagaimana marginalisasi penduduk berakar pada pola administrasi kolonial (Brett and Fentress, 1996).

Tunisia

Tunisia berada di bawah kekuasaan Prancis melalui penandatanganan Konvensi Bardo pada tahun 1881 yang secara resmi menjadikannya protektorat. Prancis mempertahankan monarki Husainiyah seperti Bey sebagai simbol legitimasi politik, tetapi mengalihkan seluruh kewenangan administratif kepada otoritas kolonial. Struktur pemerintahan protektorat di Tunisia lebih moderat dibandingkan dengan Aljazair karena Prancis tidak menerapkan sistem pemukiman skala besar. Meskipun demikian, Prancis memperkenalkan reformasi administratif dan ekonomi yang secara signifikan mengubah struktur sosial Tunisia. Administrasi kolonial menguasai sektor pendidikan, peradilan, dan perpajakan, sedangkan monarki lokal hanya berfungsi sebagai institusi seremonial. Kajian mengenai struktur protektorat ini dijelaskan oleh Perkins dalam sejarah modern Tunisia (Perkins, 2014).

Sistem pendidikan yang diperkenalkan Prancis di Tunisia bertujuan mencetak tenaga kerja yang terintegrasi ke dalam ekonomi kolonial. Prancis mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggantikan sebagian sistem pendidikan tradisional dan menempatkan bahasa Prancis sebagai bahasa administrasi serta ilmu pengetahuan. Prancis juga melakukan reorganisasi ekonomi dengan mengalihkan sebagian besar sumber daya alam, seperti pertanian dan mineral, kepada perusahaan kolonial. Kebijakan ini menimbulkan perubahan dalam struktur kelas sosial dan mendorong munculnya elit terdidik yang nantinya menjadi penggerak nasionalisme Tunisia. Institusi kolonial memperkuat modernisasi birokrasi, tetapi sekaligus

menciptakan ketergantungan pada sistem ekonomi Prancis. Temuan ini banyak dijelaskan oleh Anderson dalam pembahasan tentang transformasi sosial di Tunisia (Anderson, 1986).

Perkembangan gerakan nasionalisme Tunisia sangat dipengaruhi oleh kebijakan kolonialisme yang membatasi partisipasi politik penduduk setempat. Organisasi politik awal seperti *Destour* menuntut reformasi administratif dan perluasan hak politik, tetapi mendapat penolakan dari otoritas kolonial. Penindasan terhadap aktivis politik dan pembatasan kebebasan berpendapat memperkuat solidaritas nasional dan melahirkan organisasi *Neo Destour* pada tahun 1934 di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba. *Neo Destour* memobilisasi masyarakat Tunisia melalui strategi hukum, diplomasi, dan kampanye internasional. Kebijakan represif Prancis akhirnya membuka peluang dialog politik menjelang Perang Dunia Kedua dan berlanjut hingga masa pascaperang. Karya Charrad menjelaskan bagaimana struktur politik kolonial memengaruhi pembentukan elit nasional Tunisia (Charrad, 2002).

Menjelang pertengahan abad kedua puluh, hubungan antara Prancis dan Tunisia semakin tegang akibat meningkatnya tuntutan kemerdekaan. Prancis menghadapi tekanan internasional untuk mengurangi kontrol kolonialnya setelah berkembangnya gerakan dekolonisasi global. Tunisia memperoleh otonomi internal pada tahun 1955 melalui perundingan politik yang intensif dan akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh pada 20 Maret 1956. Transisi ini merupakan salah satu contoh dekolonisasi yang berlangsung relatif damai di Afrika Utara. Proses dekolonisasi Tunisia banyak dijadikan rujukan dalam studi politik Maghrib karena menekankan mobilisasi politik yang terorganisasi. Murphy menjelaskan bahwa keberhasilan proses dekolonisasi Tunisia tidak terlepas dari peran elit nasionalis dan tekanan internasional terhadap Prancis (Murphy, 2013).

Perjuangan Kemerdekaan di Maghribi

Perjuangan kemerdekaan Maroko merupakan proses yang kompleks, dimulai dari pertumbuhan gerakan nasionalisme modern pada awal abad ke-20 hingga pengakuan resmi kemerdekaan pada tahun 1956. Gerakan nasionalisme Maroko mulai menguat pada 1930-an melalui pembentukan Istiqlal Party, yang menjadi wadah utama mobilisasi politik rakyat Maroko terhadap kebijakan kolonial Prancis (Burke, 2019). Sultan Mohammed V memainkan peran strategis sejak 1940-an dengan menolak dominasi kolonial dan menegaskan kedaulatan nasional. Pada tahun 1953, sultan diasingkan oleh pihak Prancis, yang memicu gelombang resistensi nasional dan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Tekanan diplomasi

internasional pasca-Perang Dunia II juga memberikan momentum signifikan bagi gerakan kemerdekaan Maroko, termasuk dukungan dari Liga Arab dan negara-negara Afrika Utara lainnya yang menekankan prinsip penentuan nasib sendiri (Pennell, 2000). Mobilisasi massa, pendidikan politik, serta pembentukan jaringan diplomasi internasional berperan penting dalam memperkuat legitimasi tuntutan kemerdekaan. Strategi Partai Istiqlal memadukan pendekatan legal formal, pengorganisasian sosial, dan pengaruh elit lokal dalam struktur monarki untuk menekan pemerintah kolonial. Sepanjang periode ini, Maroko mengalami tekanan ekonomi, pengendalian administrasi, dan pembatasan kebebasan politik, yang justru memperkuat solidaritas rakyat dan kesadaran nasional. Pada akhirnya, melalui kombinasi diplomasi, mobilisasi rakyat, dan tekanan internasional, Maroko berhasil memperoleh kemerdekaan pada 2 Maret 1956. Proses ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Maroko bukan sekadar konflik fisik, melainkan juga perjuangan diplomasi, politik, dan sosial yang saling berkaitan (Laroui, 1977; Anderson, 1986).

Di Aljazair, perjuangan kemerdekaan berlangsung dalam bentuk konflik bersenjata panjang yang menimbulkan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang sangat besar. Perang kemerdekaan Aljazair dimulai secara formal pada 1 November 1954 melalui inisiatif *Front de Libération Nationale*, yang menggunakan strategi pemberontakan bersenjata di kota-kota besar dan wilayah pedesaan. Konflik ini berlangsung selama delapan tahun dan mencakup berbagai bentuk perlawanan, mulai dari perang gerilya hingga kampanye diplomasi internasional untuk memperoleh pengakuan secara global (Horne, 2006). Pemerintah kolonial Prancis menanggapi dengan kebijakan militer represif, termasuk penyiksaan dan deportasi warga sipil, yang menimbulkan banyak korban serta memperkuat legitimasi FLN di mata masyarakat internasional. Perang ini memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat Aljazair, termasuk pendidikan, ekonomi, dan struktur sosial, sehingga hampir semua komunitas terdampak langsung oleh konflik tersebut. FLN juga membangun struktur administratif alternatif di wilayah yang mereka kuasai, yang kemudian menjadi fondasi bagi pemerintahan pasca-kemerdekaan. Perjanjian Évian pada 18 Maret 1962 menandai pengakuan resmi kemerdekaan Aljazair oleh Prancis serta penetapan batas politik baru yang berimplikasi pada migrasi besar-besaran warga Eropa (*pieds-noirs*) dan restrukturisasi sosial ekonomi di negara tersebut (Evans, 2012; Brett & Fentress, 1996). Proses kemerdekaan Aljazair menekankan pentingnya kombinasi perjuangan militer, mobilisasi politik, dan diplomasi internasional sebagai strategi utama untuk mengakhiri kolonialisme Prancis di Afrika Utara.

Proses perjuangan kemerdekaan Tunisia memiliki karakter yang berbeda karena relatif

lebih damai dan berfokus pada mobilisasi politik serta negosiasi dengan kekuatan kolonial. *Neo-Destour* yang dipimpin Habib Bourguiba menjadi penggerak utama dalam membangun konsolidasi politik nasional. Strategi mereka menggabungkan mobilisasi massa melalui demonstrasi, propaganda, dan pendidikan politik, serta negosiasi formal dengan pemerintah Prancis untuk mencapai otonomi internal (Perkins, 2014). Perundingan intensif antara Bourguiba dan pejabat Prancis menghasilkan otonomi internal pada 1955, yang kemudian diikuti oleh kemerdekaan penuh pada 20 Maret 1956. Strategi hukum dan diplomasi yang diterapkan *Neo-Destour* membedakan Tunisia dari Aljazair yang menempuh jalur perang bersenjata, serta dari Maroko yang memadukan diplomasi dan mobilisasi monarki. Keberhasilan Tunisia dalam meraih kemerdekaan secara relatif damai menekankan pentingnya peran elit nasionalis, struktur organisasi partai politik, dan kapasitas negosiasi dalam mencapai kedaulatan (Anderson, 1986; Charrad, 2002). Selain itu, legitimasi elit nasionalis Tunisia semakin diperkuat melalui keberhasilan mereka dalam menjaga stabilitas internal, membangun institusi politik baru, serta mengimplementasikan reformasi sosial dan pendidikan pascakolonial yang signifikan.

Di Maroko, peran monarki pascakemerdekaan menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas politik dan membentuk arah pembangunan negara. Sultan Mohammed V dan penerusnya, Hassan II, berperan tidak hanya sebagai simbol kesatuan nasional, tetapi juga sebagai pengendali partai politik dan birokrasi negara (Burke, 2019). Meskipun Maroko sempat mengalami periode ketegangan politik dan protes internal pada 1960-an hingga 1980-an, reformasi politik pada 1990-an, termasuk desentralisasi administrasi dan modernisasi ekonomi, berhasil meningkatkan stabilitas nasional. Penguatan hak-hak sipil, pengembangan sistem pendidikan, dan diplomasi regional yang aktif menjadikan Maroko sebagai model keberhasilan transisi politik pascakemerdekaan di kawasan Maghrib. Dampak dari transisi ini juga terlihat pada kemampuan Maroko untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab dan Barat secara bersamaan, sambil tetap menjaga kedaulatan internal (Pennell, 2000; Laroui, 1977). Stabilitas politik Maroko pascakolonial sekaligus menunjukkan pentingnya kombinasi antara institusi monarki yang kuat dan partai politik yang diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan aspirasi nasional.

Transisi politik pascakemerdekaan di Aljazair berlangsung dengan dinamika yang jauh lebih kompleks akibat dominasi FLN dan peran militer yang kuat. Setelah 1962, FLN membentuk negara satu partai dengan orientasi sosialisme negara, yang menekankan kontrol ekonomi, pendidikan, dan politik secara sentralistik (Horne, 2006). Ketegangan internal elit

politik, dominasi militer dalam pemerintahan, dan ketergantungan ekonomi pada ekspor minyak dan gas bumi menimbulkan berbagai konflik struktural. Krisis politik besar terjadi pada 1991 ketika kemenangan *Front Islamique du Salut* dalam pemilu dibatalkan, yang kemudian memicu perang saudara berkepanjangan hingga awal 2000-an. Walaupun Aljazair berhasil menstabilkan situasi melalui kebijakan rekonsiliasi nasional, sistem politik tetap sangat dipengaruhi oleh militer dan elit politik lama (Evans, 2012; Brett & Fentress, 1996). Model transisi ini berdampak signifikan pada persepsi internasional mengenai kemampuan Aljazair membangun demokrasi yang stabil serta memengaruhi dinamika keamanan di seluruh Maghrib.

Transisi politik di Tunisia pascakemerdekaan menekankan modernisasi sosial dan pembangunan institusi negara yang kuat, terutama pada era Bourguiba. Kebijakan yang diimplementasikan mencakup reformasi pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta penguatan hak-hak perempuan, yang membedakan Tunisia dari negara Maghrib lainnya (Perkins, 2014). Namun, struktur politik Tunisia mengalami personalisasi kekuasaan ketika Bourguiba dan kemudian Ben Ali mendominasi seluruh struktur politik, sehingga membatasi pluralisme politik. Revolusi 2011 menandai perubahan radikal menuju sistem demokrasi pluralistik, sekaligus menunjukkan keterbatasan model pembangunan otoritarian yang sebelumnya diterapkan. Meskipun Tunisia berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama dan memperkuat lembaga negara, tantangan ekonomi dan polarisasi politik tetap menjadi hambatan signifikan bagi proses demokratisasi (Charrad, 2002; Murphy, 2013). Transisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi sosial tidak selalu sejalan dengan stabilitas politik dan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

Kejayaan gerakan nasionalisme Maroko juga ditunjang oleh dukungan internasional yang signifikan, termasuk Liga Arab dan komunitas internasional yang menekankan prinsip penentuan nasib sendiri bagi negara-negara bekas koloni. Tekanan internasional ini membantu memperkuat posisi Maroko dalam negosiasi kemerdekaan, serta memberikan legitimasi bagi Istiqlal Party dan monarki untuk menuntut pengakuan penuh dari Prancis (Pennell, 2000). Kekuatan diplomasi ini juga dipengaruhi oleh perubahan geopolitik pasca-Perang Dunia II, ketika konsep dekolonisasi mulai diterima di forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan eksternal ini memperkuat mobilisasi internal, meningkatkan moral rakyat, serta memberikan tekanan politik yang efektif terhadap pemerintah kolonial Prancis, sehingga memungkinkan tercapainya kemerdekaan Maroko secara damai dan secara formal pada 1956 (Burke, 2019; Laroui, 1977). Strategi ini menekankan pentingnya kombinasi

mobilisasi domestik dan diplomasi global dalam proses dekolonisasi.

Dalam konteks Aljazair, pengaruh internasional terhadap proses kemerdekaan juga sangat signifikan. FLN berhasil memanfaatkan opini global untuk menekan pemerintah Prancis, dengan mendukung kampanye internasional di forum PBB, Liga Arab, dan negara-negara non-blok (Horne, 2006). Dukungan diplomatik ini membantu memunculkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Prancis, yang semakin memperlemah posisi mereka dalam konflik bersenjata. Selain itu, bantuan logistik dan politik dari negara-negara Arab serta organisasi internasional meningkatkan kapasitas perlawanan FLN di lapangan. Dampak diplomasi internasional ini terlihat jelas ketika Perjanjian Évian pada 1962 berhasil memfasilitasi pengakuan resmi kemerdekaan Aljazair. Hal ini menegaskan bahwa perang kemerdekaan Aljazair bukan hanya perjuangan internal, tetapi juga konflik dengan dimensi internasional yang menentukan hasil akhirnya (Evans, 2012; Brett & Fentress, 1996).

Perjuangan kemerdekaan Tunisia menekankan strategi mobilisasi politik yang efektif, yang berhasil menyeimbangkan tekanan domestik dan tekanan diplomatik internasional. *Neo-Destour* memanfaatkan kemampuan negosiasi dengan Prancis sambil menjaga dukungan rakyat melalui demonstrasi dan propaganda politik yang terstruktur (Anderson, 1986). Keberhasilan Tunisia menunjukkan bahwa jalur diplomasi dan mobilisasi politik yang terencana dapat mencapai kemerdekaan tanpa konflik bersenjata besar, sekaligus memperkuat legitimasi elit nasionalis pascakolonial. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya struktur partai politik, kemampuan negosiasi, dan mobilisasi masyarakat dalam menghadapi kekuatan kolonial yang dominan. Hasilnya, Tunisia berhasil mempertahankan stabilitas internal, membangun institusi politik baru, dan mengimplementasikan reformasi sosial yang memberikan fondasi kuat bagi pembangunan negara modern (Perkins, 2014; Charrad, 2002).

Proses dan Dampak Transisi Politik Pascakemerdekaan

Pascakemerdekaan Maroko pada 1956 menandai berakhirnya protektorat Prancis dan Spanyol serta pembentukan negara berdaulat dengan sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh Sultan Mohammed V. Setelah kemerdekaan, monarki menjadi institusi utama yang memusatkan kekuasaan serta membimbing pembentukan struktur politik dan administrasi negara. Raja Mohammed V melakukan konsolidasi politik melalui penegasan otoritas monarki sekaligus menjaga hubungan dengan partai nasionalis utama, yaitu Istiqlal. Penggantinya, Hassan II, melanjutkan proses modernisasi negara sekaligus memperkuat kontrol politik dengan menyeimbangkan kekuasaan partai politik dan militer. Reformasi ekonomi dan politik

secara bertahap mulai diterapkan sejak 1970-an, termasuk restrukturisasi sistem birokrasi dan modernisasi lembaga peradilan. Pemerintahan Hassan II menghadapi beberapa periode ketegangan politik yang signifikan, terutama pada masa protes mahasiswa dan oposisi politik, namun berhasil mempertahankan stabilitas nasional melalui kombinasi kebijakan reformis dan konsolidasi elit politik. Pada era pemerintahan Mohammed VI, sejak 1999, Maroko melakukan serangkaian reformasi politik yang signifikan, termasuk pembaruan konstitusi tahun 2011 yang memperkuat peran parlemen dan lembaga peradilan serta menjamin hak-hak sipil yang lebih luas. Desentralisasi kekuasaan ke tingkat regional perlu diperluas untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat lokal. Reformasi hak asasi manusia juga mengalami kemajuan, meskipun tantangan tetap ada terkait kebebasan pers dan kontrol monarki terhadap lembaga negara. Stabilitas politik yang relatif tinggi membuat Maroko menjadi salah satu negara dengan dinamika politik paling konsisten di kawasan Maghrib, sekaligus memfasilitasi peran aktif Maroko dalam diplomasi regional dan hubungan internasional (Entelis, 2004; Pennell, 2000; Anderson, 1986).

Transisi politik pascakemerdekaan di Maroko memengaruhi perkembangan sistem partai serta hubungan antara monarki dan masyarakat sipil. Partai-partai politik beroperasi dalam kerangka yang diatur oleh monarki, sehingga partisipasi politik tetap berada dalam koridor yang terkendali. Pemerintah Maroko secara strategis mempromosikan stabilitas melalui reformasi ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan sosial yang meningkatkan legitimasi monarki di mata rakyat. Hubungan dengan negara-negara tetangga dan aktor internasional turut dipengaruhi oleh kepemimpinan monarki yang menekankan diplomasi aktif dalam isu-isu regional seperti konflik Sahara Barat dan integrasi ekonomi Maghrib. Institusi militer, walaupun berperan signifikan dalam keamanan nasional, tetap berada di bawah kendali monarki sehingga konflik politik internal dapat diminimalkan. Selain itu, Maroko mengalami perkembangan sosial melalui modernisasi pendidikan dan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat sipil. Proses reformasi konstitusi 2011 juga menjadi respons terhadap gelombang protes regional pada Arab Spring, ketika monarki berhasil menjaga legitimasi sambil memberikan ruang bagi peningkatan kebebasan politik yang terbatas. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan adaptasi politik yang tinggi serta model transisi pascakolonial yang relatif stabil di Afrika Utara. Reformasi politik juga berdampak pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan serta hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif (Willis, 2012; Entelis, 2004; Pennell, 2000).

Aljazair, yang memperoleh kemerdekaan pada 1962 setelah perjuangan bersenjata

panjang melawan Prancis, membangun sistem politik satu partai yang dikuasai oleh *Front de Libération Nationale*. FLN mengadopsi orientasi sosialisme negara dengan dominasi politik militer untuk mengamankan stabilitas nasional pasca-perang. Struktur politik Aljazair dirancang untuk menjaga kontrol politik oleh elit revolusioner FLN, dengan penekanan pada kepemilikan negara atas sumber daya strategis seperti minyak dan gas. Ketergantungan pada sumber daya energi menjadi fondasi ekonomi sekaligus instrumen politik dalam mengelola konflik sosial dan konflik regional. Sistem satu partai dan pengaruh militer yang kuat membatasi munculnya oposisi politik independen, tetapi menimbulkan ketegangan internal yang menonjol pada awal 1990-an. Ketegangan ini memuncak ketika kemenangan *Front Islamique du Salut* dalam pemilu lokal dan nasional dibatalkan, yang memicu perang saudara yang berlangsung selama lebih dari satu dekade. Perang sipil ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, memengaruhi struktur pemerintahan serta hubungan negara dengan kawasan Maghrib dan dunia internasional. Kebijakan rekonsiliasi nasional yang diterapkan pada awal 2000-an berhasil mengurangi kekerasan dan memulihkan stabilitas relatif, namun institusi politik tetap sangat dipengaruhi oleh militer dan elit penguasa FLN. Ketidakstabilan internal Aljazair memiliki implikasi luas terhadap keamanan regional dan kebijakan luar negeri, terutama terkait migrasi, terorisme, serta hubungan bilateral dengan Maroko dan Tunisia (Horne, 2006; Bouandel, 1996; Roberts, 2003).

Transisi politik Aljazair menunjukkan bahwa dominasi satu partai pascakolonial berdampak jangka panjang pada pembangunan institusi demokrasi. Struktur politik yang berorientasi pada kontrol sentral dan kepentingan militer membatasi ruang partisipasi masyarakat sipil dan oposisi politik. Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam membuat pemerintah rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Upaya reformasi politik dan desentralisasi hanya berjalan terbatas karena kekuatan militer dan elit politik mempertahankan kendali atas lembaga negara. Dampak sosial dari perang sipil termasuk trauma masyarakat, migrasi internal, dan pergeseran demografi yang memengaruhi distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Hubungan Aljazair dengan negara-negara tetangga sering kali diwarnai ketegangan geopolitik, terutama dengan Maroko terkait isu Sahara Barat dan batas perbatasan. Pemerintah juga menghadapi tekanan internasional untuk memperkuat hak asasi manusia dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Secara keseluruhan, Aljazair menunjukkan model transisi politik yang kompleks, di mana stabilitas jangka panjang dicapai melalui kontrol elit politik dan militer, meskipun dengan biaya demokratisasi yang terbatas (Aghrout, 2004; Henry, 2007; Layachi, 1999).

Tunisia mengalami transisi politik yang berbeda dibandingkan dengan Maroko dan Aljazair. Setelah kemerdekaan pada 1956, Bourguiba memimpin upaya pembangunan negara modern melalui kebijakan sekularisasi, reformasi pendidikan, dan penguatan hak-hak perempuan. Strategi Bourguiba menekankan modernisasi sosial dan politik dengan membangun institusi negara yang kuat serta meningkatkan kapasitas administrasi. Reformasi sosial yang diterapkan menciptakan masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi dan integrasi gender yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Maghrib lainnya. Meski mengalami modernisasi cepat, kekuasaan Bourguiba menjadi personalistik dan cenderung otoriter, sehingga membatasi ruang partisipasi politik bagi oposisi. Pada 1987, Zine El Abidine Ben Ali mengambil alih kekuasaan melalui mekanisme konstitusional yang formal, namun memperkuat struktur pemerintahan yang otoriter. Kebijakan Ben Ali menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun mengorbankan transparansi dan kebebasan politik. Revolusi Tunisia pada 2011 menandai titik balik besar dalam sejarah negara, mengarah pada demokratisasi pluralistik dan reformasi politik yang signifikan. Proses transisi ini diwarnai oleh perdebatan konstitusional, reformasi lembaga peradilan, dan pembentukan mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Dampak sosial termasuk peningkatan kesadaran politik masyarakat, mobilisasi pemuda, dan partisipasi politik perempuan yang lebih luas. Transisi politik Tunisia menjadi contoh penting bagi proses demokratisasi di dunia Arab, meskipun tantangan ekonomi dan polarisasi politik tetap menjadi kendala utama (Charrad, 2002; Murphy, 2013; Perkins, 2014).

Modernisasi politik di Tunisia berdampak signifikan pada dinamika regional dan integrasi ekonomi di Maghrib. Kebijakan pemerintah yang menekankan pembangunan sosial, pendidikan, dan kesehatan publik menciptakan basis legitimasi bagi reformasi politik pasca-2011. Partai-partai politik baru dan masyarakat sipil mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, meskipun pembentukan institusi demokratis masih dalam tahap konsolidasi. Perubahan politik ini juga memengaruhi hubungan Tunisia dengan Maroko dan Aljazair, serta mendorong kerja sama regional di bidang keamanan, ekonomi, dan migrasi. Tantangan utama tetap terkait krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan ancaman terorisme yang memengaruhi stabilitas internal. Namun, Tunisia berhasil mempertahankan orientasi demokratis sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat sipil dan tekanan internasional. Transformasi politik Tunisia menyoroti kompleksitas transisi negara pascakolonial di Afrika Utara serta interaksi antara modernisasi, demokratisasi, dan stabilitas politik (Murphy, 2013; Charrad, 2002; Evans, 2012).

Perbandingan transisi politik Maroko, Aljazair, dan Tunisia menunjukkan variasi pendekatan terhadap pascakolonialisme dan pembangunan negara. Maroko menekankan konsolidasi monarki konstitusional dan reformasi bertahap, Aljazair mengadopsi model satu partai dengan kontrol militer yang dominan, sedangkan Tunisia menempuh modernisasi sosial yang intens sebelum memasuki fase demokratisasi. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh karakter kolonial masing-masing negara, pengalaman perjuangan kemerdekaan, serta kapasitas institusi politik dalam menanggapi tuntutan masyarakat. Masing-masing negara menghadapi tantangan tersendiri dalam hal stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan integrasi regional. Studi ini menunjukkan bahwa strategi transisi politik sangat dipengaruhi oleh konteks historis, struktur sosial, dan dinamika geopolitik di kawasan Maghrib (Laroui, 1977; Brett & Fentress, 1996; Pennell, 2000).

Kondisi ekonomi pascakolonial juga berperan besar dalam membentuk transisi politik di ketiga negara tersebut. Maroko melakukan diversifikasi ekonomi melalui investasi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri ringan, sementara Aljazair sangat bergantung pada sumber daya minyak dan gas sebagai motor ekonomi dan instrumen politik. Tunisia menekankan pembangunan sektor pendidikan, manufaktur, dan jasa untuk mendukung modernisasi serta legitimasi politik. Ketergantungan pada sektor tertentu memengaruhi kemampuan negara dalam menghadapi krisis ekonomi, memitigasi konflik sosial, dan melaksanakan reformasi politik. Hubungan ekonomi ini juga berdampak pada integrasi kawasan Maghrib dan kerja sama lintas negara dalam perdagangan, migrasi, dan keamanan (Benda-Beckmann, 2002; Hernandez, 2018; Anderson, 1986).

Dinamika sosial dan budaya turut membentuk proses transisi politik pascakolonial. Modernisasi pendidikan, urbanisasi, dan reformasi gender memengaruhi pola partisipasi politik masyarakat di ketiga negara tersebut. Maroko mengalami peningkatan kesadaran sipil melalui desentralisasi politik dan pembentukan lembaga lokal, Aljazair menghadapi ketegangan antara struktur otoritarian dan aspirasi demokratis, sedangkan Tunisia menunjukkan integrasi gender dan modernisasi sosial yang lebih maju. Faktor budaya dan sejarah kolonial juga memengaruhi legitimasi pemerintah serta strategi elit politik dalam mengelola konflik internal. Interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan politik menciptakan pola transisi yang berbeda di antara Maroko, Aljazair, dan Tunisia, sekaligus menentukan arah pembangunan negara-bangsa di kawasan Maghrib (Burke, 2019; Perkins, 2014; Charrad, 2002).

Keseluruhan proses transisi politik pascakemerdekaan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan negara modern sangat tergantung pada

kombinasi faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik. Stabilitas politik Maroko, kontrol militer Aljazair, dan modernisasi sosial Tunisia menjadi contoh nyata bagaimana strategi pascakolonial yang berbeda menghasilkan konsekuensi luas bagi pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Analisis ini memberikan wawasan penting mengenai peran warisan kolonial, karakter elit politik, serta kapasitas institusi negara dalam membentuk transisi politik yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap pengalaman ketiga negara ini menjadi acuan penting bagi studi dekolonisasi, pembangunan negara, dan dinamika politik Afrika Utara kontemporer (Pennell, 2000; Evans, 2012; Horne, 2006).

KESIMPULAN

Perjuangan kemerdekaan di Maroko, Aljazair, dan Tunisia memperlihatkan keragaman strategi dekolonisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakter kolonialisme yang diterapkan di masing-masing wilayah serta dinamika sosial internal yang kompleks. Di Maroko, proses dekolonisasi berjalan melalui kombinasi negosiasi politik yang dipimpin oleh Sultan Mohammed V dan mobilisasi rakyat melalui partai-partai nasionalis modern seperti Istiqlal Party, yang berhasil memanfaatkan legitimasi monarki untuk memperkuat tuntutan kemerdekaan dan menekan pemerintah kolonial Prancis. Pendekatan ini berbeda dengan Tunisia yang menekankan diplomasi intensif, konsolidasi elit nasionalis melalui *Neo-Destour*, serta penggunaan strategi hukum dan politik untuk menegosiasikan otonomi internal dan kemudian kemerdekaan penuh dari Prancis, sehingga Tunisia berhasil mencapai kemerdekaan tanpa melalui perang besar dan kehilangan banyak korban manusia. Sementara itu, Aljazair mengalami perjuangan paling intens dan berdarah melalui *Front de Libération Nationale* yang melancarkan perang bersenjata selama delapan tahun, menggabungkan perlawanan gerilya di pedesaan dan perlawanan urban, serta kampanye diplomasi internasional untuk menekan Prancis agar mengakui kemerdekaan. Perbedaan karakter kolonialisme ini, mulai dari model protektorat Maroko dan Tunisia hingga koloni pemukim di Aljazair, secara langsung memengaruhi metode perjuangan dan strategi politik masing-masing negara, sekaligus menegaskan bahwa proses dekolonisasi di Maghribi tidak homogen, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang unik di setiap wilayah.

Transisi politik pascakemerdekaan di ketiga negara juga menunjukkan dinamika yang berbeda sesuai dengan bentuk perjuangan kemerdekaan dan struktur kolonial yang ditinggalkan. Maroko mengembangkan sistem monarki konstitusional yang memusatkan kekuasaan pada institusi monarki, sekaligus membentuk partai politik nasional dan

memperkuat lembaga pemerintahan, sehingga mengalami stabilitas yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara tetangganya. Di Aljazair, dominasi *Front de Libération Nationale* dan peran militer yang kuat membentuk sistem politik satu partai dengan orientasi sosialisme negara, yang kemudian menghadapi ketidakstabilan serius ketika pembatalan pemilu pada 1991 memicu perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade, sehingga menekankan kompleksitas transisi politik di negara yang pernah melalui perang kemerdekaan paling berdarah. Tunisia, setelah kemerdekaan, memulai modernisasi sosial, pendidikan, dan reformasi hak perempuan di bawah Bourguiba, Kekuasaan yang bersifat personalistik dan otoritarian pada era Bourguiba dan Ben Ali menimbulkan tantangan bagi institusi demokratis. Revolusi 2011 menjadi titik penting bagi transisi Tunisia menuju demokrasi, tetapi polarisasi politik dan krisis ekonomi menunjukkan bahwa keberhasilan modernisasi dan demokratisasi pascakemerdekaan tidak hanya bergantung pada strategi perjuangan kemerdekaan, melainkan juga pada kapasitas negara untuk membangun institusi politik yang efektif dan mampu menyeimbangkan tuntutan masyarakat serta elit politik.

Keseluruhan pengalaman dekolonisasi dan transisi politik di Maroko, Aljazair, dan Tunisia menunjukkan bahwa warisan kolonial dan konfigurasi kekuasaan internal memainkan peran kunci dalam membentuk arah politik kawasan Maghrib hingga saat ini. Strategi perjuangan kemerdekaan yang berbeda menghasilkan model negara yang berbeda pula, di mana Maroko menekankan stabilitas monarki konstitusional, Aljazair menempatkan militer sebagai aktor sentral dalam politik nasional, dan Tunisia menempuh jalur modernisasi yang kemudian menghadapi tantangan dalam proses demokratisasi. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara berada dalam kawasan yang sama, pengalaman sejarah kolonial, pola mobilisasi nasionalis, serta dinamika internal elit menentukan jalur politik pascakemerdekaan dan memengaruhi hubungan regional, perkembangan ekonomi, serta orientasi politik luar negeri masing-masing negara. Analisis ini menegaskan bahwa transisi politik di Maghrib bukan sekadar konsekuensi kemerdekaan, melainkan hasil interaksi kompleks antara warisan kolonial, mobilisasi rakyat, elit politik, dan kondisi sosial-ekonomi yang membentuk stabilitas serta karakter politik kontemporer di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwitama, A. (2022). Peran Maroko dalam mempertahankan wilayah Sahara Barat. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 7(3).
- Aghrout, A. (2004). Political reform in Algeria: In search of legitimacy. *The Journal of North*

- African Studies, 9(2), 1–20.
- Anderson, L. (1986). *The State and Social Transformation in Tunisia and Libya, 1830–1980*. Princeton University Press.
- Baidah, A., Juliandi, B., & Marhaban, M. (2021). Politik dan konservatisme Islam di Indonesia dan Tunisia. *Jurnal Ar-Raniry*.
- Benda-Beckmann, F. von. (2002). *Colonialism and Law in Africa*. Routledge.
- Bouandel, Y. (1996). The Algerian crisis: Origins and consequences. *Third World Quarterly*, 17(2), 229–241.
- Brett, M., & Fentress, E. (1996). *The Berbers*. Blackwell.
- Burke III, E. (2019). *The History of Morocco*. Cambridge University Press.
- Charrad, M. (2002). State building and women’s rights in Tunisia. *Middle East Journal*, 56(3), 567–584.
- Entelis, J. (2004). Reform and regime survival in Morocco. *Middle East Journal*, 58(1), 45–62.
- Evans, M. (2012). *Algeria: France’s Undeclared War*. Oxford University Press.
- Ghafur, M. F. (2016). Problematika kekuatan politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair.
- Haddad, E. (2018). The return of Morocco to the African Union. *African Affairs*.
- Henry, C. (2007). Authoritarian persistence and the Maghreb’s political economy.
- Hernandez, K. (2018). *Colonial North Africa*. Routledge.
- Horne, A. (2006). *A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962*. New York Review Books.
- Laroui, A. (1977). *History of the Maghrib: From the Arab Conquest to the Present*. Princeton University Press.
- Layachi, A. (1999). Political liberalization in Morocco. *The Journal of Modern African Studies*, 37(1), 165–175.
- Murphy, E. (2013). Tunisia after the Arab Spring. *The Journal of North African Studies*.
- Nurhidayah, R., Nor Farikhah, D. S., & Saputri, F. I. (2022). Sistem ketatanegaraan Maroko sebagai negara Islam. *Jurnal Fasya*, 3(1).
- Pennell, C. R. (2000). *Morocco since 1830: A History*. New York University Press.
- Perkins, K. (2014). *A History of Modern Tunisia*. Cambridge University Press.
- Rizwan, M., Abdullah, T., Mulyadi, & Faisal, N. (2023). Relasi Islam dan politik di berbagai negara Muslim. *Jurnal Transparansi Publik*, 3(2).
- Roberts, H. (2003). The battlefield Algeria, 1988–2002. *Middle East Report*.
- Willis, M. (2012). Political parties in the Maghreb. *The Journal of North African Studies*.